

*Artikel diterbitkan di Harian Umum Pikiran Rakyat (Kamis, 22 Juli 2010)*

## **Meningkatkan Daya Saing Daerah**

Oleh: H. Obsatar Sinaga

Dua hal bersamaan yang mendera negara berjuluk kapitalis saat ini adalah krisis utang luar negeri yang melebihi kemampuan nasional masing-masing negara Eropa dan kelambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Kedua hal tersebut memang belum dirasakan saat ini secara riil oleh negara berkembang. Akan tetapi dapat dipastikan dengan jumlah penduduk miskin Eropa yang bergerak dari angka 13 juta jiwa saat ini menuju ke angka 48 juta jiwa pada awal tahun 2012. Perubahan angka penduduk miskin tersebut akan memaksa negara maju mengalirkan dana bantuan ke Eropa untuk menjaga efek domino dari dampak krisis yang merembet ke semua kekuatan ekonomi kapitalis.

Dapat dipastikan, ketika peningkatan perhatian Dunia ke penduduk Eropa itu meningkat ketika itu pula berkurang daya serap berbentuk bantuan luar negeri yang akan dihasilkan oleh negara-negara berkembang yang selama ini begitu percaya pada sistem kapitalis-liberal. Sejumlah angka persentase dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipenuhi dari bentuk pinjaman luar negeri bagi negara yang sangat meyakini sistem pasar, akan “macet” karena likuidasi bantuan yang bergerak untuk memperbaiki kondisi *reschedulling* utang luar negeri negara-negara Eropa.

Angka pertumbuhan ekonomi yang rata-rata hanya sampai pada 1,6 % di seluruh Eropa dengan dominasi Jerman yang hanya sampai angka 2,9 % memaksa banyak kebijakan yang unik di kawasan Eropa ini. Mulai dari kebijakan pengenaan pajak tinggi dari setiap transaksi keuangan sampai dengan kebijakan *Yield* (imbas hasil) serta *funding cost* (biaya pendanaan) diterapkan untuk bisa segera membangkitkan perekonomian kawasan itu.

Persoalannya justru, apakah kebijakan-kebijakan tersebut tidak memberikan dampak yang akan menyulitkan negara-negara berkembang yang selama ini banyak bergantung pada kekuatan bantuan negara-negara maju? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepercayaan kepada sistem kapitalis dunia?

### **Kapitalis vs EPS**

Akhir Perang Dingin (*cold war*) memposisikan kekuatan sosialis-komunis menjadi pihak yang termarginalkan karena posisinya yang dinggap tidak dapat mempertahankan kondisi kemakmuran bagi negara-negara satelitnya. Catatan sejarah dengan ambuknya tembok Berlin dan diiringi oleh bubarnya Uni Soviet menjadi (*Common Independent States--CIS*) menjadi dasar prediksi bahwa sistem sosialis-komunis tidak dapat menjanjikan kenyataan sejahtera bagi

negara-negara penganutnya. Sekaligus, hal ini memposisikan kapitalis liberal sebagai kekuatan pemenang yang dianggap mampu menjanjikan kemakmuran bagi pengikutnya.

Kepercayaan dunia berkembang ke arah tumpuan untuk meyakini bahwa kapitalis liberal dengan motor kapitalis Barat, bisa dijadikan harapan satu-satunya untuk mengatasi krisis ekonomi di negara-negara berkembang. Berbagai harapan dari setiap rancangan anggaran belanja dari masing-masing negara selalu berkait langsung dengan bantuan IMF, World Bank dan berbagai lembaga keuangan kapitalis. Tidak usah jauh-jauh kita ambil contoh Indonesia saja, dari sejumlah 1050 triliun hampir 40% diambil dari pinjaman luar negeri, yang notabene berasal dari kelompok kapitalis liberal. Dan masih banyak lagi di negara-negara berkembang lainnya yang bergantung pada bantuan kapitalis.

Akan tetapi kenyataan berbeda. Krisis ekonomi di Eropa dengan utang luar negeri yang melebihi kemampuan nasionalnya dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menggeser perhatian kapitalis kepada kepentingan di negerinya sendiri. Krisis tersebut sebetulnya sudah berjalan sejak 3 tahun terakhir dengan terus merosotnya stigma pertumbuhan ekonomi di Eropa dan Amerika. Karena itu berbagai perhatian bagi sekutu kapitalis liberal di banyak bagian dunia tidak terperhatikan dalam tahun-tahun terakhir ini. Sehingga wajar bila terjadi krisis ekonomi yang berujung politik, seperti di negara-negara Timur Tengah. Jatuhnya Hosni Mubarak sebagai tokoh tirani pro kapitalis juga diawali dengan kondisi ekonomi yang tidak teratasi di Mesir. Rentetan kekuasaan yang ambruk di banyak negara seperti Mesir itu merupakan bukti turunnya perhatian kapitalis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi mereka.

Negara-negara donor akan lebih banyak mencurahkan perhatian kepada krisis Eropa karena mengkhawatirkan munculnya ancaman baru dari jumlah pengangguran yang akan terus meledak. Sebuah keyakinan akan pemikiran *good neighbour policy* menjadi kekhawatiran baru bagi negara donor bila angka pengangguran di Eropa terus meningkat. Belum lagi, berbagai perkembangan politik yang terjadi di beberapa negara “tirani” mulai dari Mesir, Tunisia, Yaman sampai ke Libya memberikan kekhawatiran tersendiri kepada negara-negara donor apabila imbasnya akan membawa gerakan sporadis di Eropa.

Secara tidak langsung, posibilitas di Eropa akan mengurangi kemampuan sektor riil di negara berkembang. Saat ini jumlah penduduk Eropa sekitar 500 juta jiwa dari keanggotaan EU sebanyak 27 negara. Dari jumlah penduduk tersebut ada 13 juta yang miskin. Sehingga EU menyiapkan dana bantuan untuk orang miskin sebesar 480 juta Euro. Dan tahun mendatang akan diturunkan sampai 113 juta Euro karena kondisi ekonomi. Uniknya, justru Eropa memandang kekuatan ekonomi baru yang akan menjadi ancaman adalah China, India dan Brazil. Sehingga Eropa mengintegrasikan mata uangnya dalam bentuk Euro tahun 2001 untuk menghadapi kekuatan ekonomi baru tersebut.

Tampilnya kekuatan Cina merupakan pertanda dari turunnya kapabilitas kapitalis Liberal. Cina lebih bisa menyesuaikan dengan berbagai perubahan dunia dengan jatuhnya sistem sosialis

komunis Barat. Cina memilih jalan tengah dengan mempertahankan sistem sosialis namun lebih mengadopsi pasar dengan julukan ekonomi pasar sosialis (EPS) yang toleran kepada sistem pasar namun tetap mengandalkan regulasi pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri.

Sementara itu, Cina mengembangkan sistem ekonomi pasar sosialis (EPS) untuk menunjukkan sifat dinamis dari sistem ekonomi sosialis. Sistem EPS ini bersifat terbuka terkendali dengan memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dianggap “tabu”, yakni: (1) investasi boleh masuk; (2) persaingan pasar digalakkan; dan (3) kepemilikan pribadi diperbolehkan. Hal tersebut berhasil membawa Cina sebagai jajaran negara terkuat secara ekonomi justru ketika negara kapitalis liberal sebagai pemilik sistem mekanisme pasar berjatuhan.

Ada prinsip yang diterapkan Cina khusus untuk produk kebutuhan barang-barang konsumtif. Pemerintah Cina memasarkan produk untuk keperluan efisiensi bagi produk konsumsi. Sebagai contoh, produksi sepeda yang ada di Cina untuk warga negaranya dibuat dengan kualitas tinggi dengan perhitungan *long life* namun harga yang lebih murah dari barang yang sama dari impor. Akibatnya, meskipun menganut sistem pasar, barang-barang produksi dalam negeri tidak dapat dikalahkan oleh produksi impor.

Di sisi lain, produksi barang yang diekspor oleh pemerintah Cina ke negara lain sebagai konsekuensi pembukaan pasar dalam negeri Cina, memiliki harga bersaing yang tinggi. Konsep perdagangan EPS ini mengakibatkan produksi Cina membanjiri pasar dunia, sementara pasar dalam negeri Cina masih berpegang pada produksi dalam negeri.

Belum lagi investasi asing yang masuk ke Cina hampir menyeluruh dikemas dalam bentuk *joint ventura* (modal ventura) dengan mengikutsertakan pemodal domestik sebagai pendamping sehingga tetap dalam kontrol pemerintah Cina. Berbagai kemudahan bagi investor untuk masuk ke Cina khususnya dalam persoalan regulasi administratif.

### **Entitas globalisasi**

Ada lagi berbagai kesulitan yang selama ini dihadapi oleh negara berkembang, meskipun mereka menjadi penganut sistem kapitalis liberal. Kita sebut kesulitan itu sebagai entitas (muatan) globalisasi. Sejak awal munculnya istilah globalisasi (mondialisasi) dalam pergaulan dunia internasional, muatan yang selalu hadir dalam entitas utamanya adalah: (1) isu lingkungan hidup; dan (2) demokratisasi; serta (3) hak azasi manusia. Tiga entitas ini yang kemudian menjadi inti dari setiap gerakan negara-negara besar untuk melakukan interaksi dengan negara-negara berkembang (*developed countries*). Keseringannya, negara besar memperlakukan negara berkembang dalam tiga entitas globalisasi tersebut sehingga dalam interaksinya tidak bias berbuat banyak kecuali kemudian menyerahkan seluruh kondisi kepada negara besar (*great power*).

Lebih jauh, untuk melakukan hubungan perdagangan saja, negara berkembang dihadapkan pada persyaratan yang disebut sebagai entitas globalisasi tersebut. Setiap produk *developed countries* yang masuk ke pasar Eropa kemudian dikenakan persyaratan yang tidak sedikit di luar custom union yang sudah berlaku di kawasan itu secara umum. Tuduhan terhadap negara berkembang bahwa produknya merusak lingkungan, misalnya, diarahkan sebagai “senjata” untuk menekan bagi komoditi yang datang dari negara berkembang. Kayu dari negara berkembang yang masuk ke Eropa di sebutkan secara general merusak lingkungan. Dan diberlakukan aturan yang sama bahwa kayu tersebut tidak diizinkan untuk masuk dengan harga normal yang berlaku di Eropa karena untuk mendukung pelestarian lingkungan dunia. Walhasil, barang yang sudah sampai di daratan Eropa dan tidak laku dijual dengan harga kompetitif pasar diturunkan harga secara drastis. Pertimbangan para produsen dari negara berkembang adalah biaya ongkos angkut yang harus tertutup, ketimbang harus membawa kembali pulang ke negara asalnya.

Tidak hanya itu, produk barang jadi dari sisi manufaktur yang diekspor ke European Union juga dicegah lagi dengan alasan yang kuat dari sisi tenaga kerja. *developed countries* disandera dengan sebutan melanggar hak azasi manusia karena sektor-sektor produksi dituduh memperkerjakan anak-anak di bawah umur atau bahkan memberika *salary* yang tidak memenuhi ketentuan minimal (upah minimum). Tuduhan tersebut dipergunakan sebagai “senjata kedua” untuk menekan produksi barang jadi *developed countries* sehingga tidak masuk dengan mudah menjadi *competitive advantage* bagi pasar Eropa. Ujung-ujungnya, produk barang jadi tersebut juga tersimpan di gudang pelabuhan dan terancam untuk dikembalikan ke negara asalnya, sehingga aksi *safety trading* dilakukan dengan pertimbangan asal laku dan tidak membawa kembali pulang ke negara asalnya.

Dan aksi “dosa” yang ketiga yang dilakukan *great power* adalah dengan memasang muatan globalisasi bergelar demokratisasi. Dengan entitas yang satu ini banyak engara yang memiliki penghasilan komoditas sumber daya alam cukup baik kemudian direpotkan dengan berbagai praktek politik di dalam negeri yang tidak berkait langsung dengan proses produksi. Tidak sedikit negara yang terkena dengan dampak yang satu ini, misalnya Myanmar yang dipimpin oleh junta militer, dianggap sebagai negara tidak menjalankan demokratisasi sehingga produknya harus dihambat untuk masuk meskipun komoditinya baik dan dibutuhkan. Akhirnya masih tetap sama pada praktik, negara-negara yang dituduh tidak demokratis itu mendapat ganjalan untuk bisa bersaing dalam tataran produksi dengan pasar Eropa.

Belum lagi sebutan yang selalu memberikan klasifikasi bahwa negara Dunia Ketiga (*Third World*) sebagai negara sedang berkembang (*developed countries*) atau negara terbelakang (*underdeveloped countries*) merupakan cara untuk menempatkan negara besar sebagai kelompok yang berada dalam sisi sentral dalam pengembangan peradaban manusia. Sedangkan negara terbelakang dan negara berkembang merupakan sisi lain dari sebutan *phery-phery* (pinggiran) yang tidak jauh pengertiannya dengan makna *uncivilization* (bangsa yang tidak beradab). Posisi tersebut sama artinya dengan menempatkan *underdeveloped countries* dan *developed countries*

sebagai bangsa yang tidak harus dihormati dalam kaca perhubungan antar bangsa. Hal tersebut juga sekaligus memposisikan negara berkembang menjadi negara yang tidak harus mendapat perlakuan yang layak dalam *international order* (tata hubungan internasional) karena masih belum layak untuk dianggap sebagai bangsa yang beradab.

Dalam kapasitas yang tidak sama tersebut penekanan lain juga hadir ketika setiap produk barang mentah maupun barang jadi dihubungkan dengan nilai kepantasan sebuah komoditas produksi layak untuk dikonsumsi atau tidak oleh bangsa yang disebut sebagai bangsa beradab. Berbagai ancaman penyakit yang unik seperti flu burung, ebola dan masih banyak lagi jenisnya menjadi alasan yang kuat untuk melakukan proteksi semua terhadap produksi dari negara-negara terbelakang tersebut. Tragisnya dalam kondisi demikian, tidak ada kesempatan untuk melakukan pembelaan kecuali harus menerima bahwa produknya harus dimusnahkan justru ketika masih berada di dalam negeri. Kasus flu burung saja sudah memberikan opsi pembantaian unggas di negara berkembang yang begitu banyak jumlahnya. Demikian halnya flu babi yang juga diiringi dengan banyaknya binatang ternak yang harus dimusnahkan pula.

Entitas globalisasi tersebut semakin menjadi pemicu menurunnya kepercayaan pada sistem kapitalis liberal. Sebab, sejak awal kemenangan melawan kekuatan sosialis-komunis di Blok Timur, negara-negara penganut sistem kapitalis merasa akan mendapat kesejahteraan dengan kemenangan tersebut sebagai imbasnya. Namun nyatanya malah menderita dengan perlakuan mondial yang dilakukan justru oleh para sponsornya di kapitalis liberal.

### **Catatan akhir**

Bila keadaan ini terus terjadi, maka diyakini bahwa *international order* akan dikuasai oleh Cina. Dukungan Cina untuk membangkitkan perekonomian Vietnam merupakan cara lain pemerintah Cina untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa sistem sosialis yang dianutnya lebih menjanjikan kemakmuran. Berbagai perjanjian yang dilakukan Cina dengan berbagai kawasan, seperti perjanjian dengan ASEAN dalam bentuk perdagangan bebas ACFTA (*ASEAN-CHINA Free Trade Agreement*).

Berbagai keberhasilan Cina membuka perdagangan bebas dengan kawasan potensial dan juga kemampuan Cina mempertahankan diri dari krisis mata uang dolar, membuat negara itu semakin mendapat kepercayaan dari negara berkembang untuk mengambil kiblat baru ke Cina. Catatan laju pertumbuhan ekonomi Cina yang sudah mencapai angka 10 digit di atas Amerika Serikat semakin memperkuat posisi tawar negara tirai bambu itu untuk tidak selalu mengikuti “gaya” ekonomi politik Amerika.

Goyahnya kekuatan ekonomi kapitalis liberal untuk menjanjikan kemakmuran dan semakin menguatnya Cina dalam mengendalikan kekuatan ekonomi dunia menjadi fenomena baru bagi kekuatan pengendalian ekonomi dunia. Cina mungkin tidak menyebut dirinya sebagai kekuatan ekonomi pengendali yang baru dari *international order*, akan tetapi kekuatan kapitalis

liberal mulai dipertanyakan kemampuannya untuk mewujudkan kesejahteraan. *Wait and see* apa yang akan terjadi sesudahnya.

*Penulis adalah Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional Pasca Sarjana FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung.*